

# **KEBIJAKAN PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN pada USAHA KECIL dan MENENGAH (UKM) di JAWA TIMUR**

**Ryelo Havifuddin Ashari**  
**M. Kholid Mawardi**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
Email : ryelohavifuddin@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Research on the policy of expanding the financing of small and medium enterprises (SMEs) in the province of East Java is basically have a purpose to assess whether the program has already fit in accordance of the principals of SME. In the attempt to see the phenomenon that occurs in its implementation, this study uses a type of descriptive study with a qualitative approach. Researchers analyze the data by using the interactive model. Component analysis conducted is the reduction of the data, the presentation of the data and draw conclusions. In this analysis using the triangulation technique with varying data to get the data from the same source. This research was viewed from two points of view i.e. And then the researcher looking at the phenomena that occurs if the program funds rolling can have an effect on the competitiveness of SMES. Based on the results of the research implementation undertaken the service of cooperatives and SMEs in East Java on a Dana Bergulir Program is already good enough. But the lack of socialization in depth about the program makes the perspective of perpetrators of SMES is still lacking, particularly liability capital provided. The lack of responsibility towards the SME Revolving Fund does not affect their competitiveness.*

**Keywords:** *SMES, Financial Policy, Revolving Fund*

## **ABSTRAK**

Penelitian tentang kebijakan perluasan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Jawa Timur pada dasarnya dilakukan untuk menilai apakah program yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM. Dalam upaya melihat fenomena yang terjadi pada implementasinya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan Analisa data dengan menggunakan *interactive model*. Komponen analisis yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dalam analisis ini menggunakan tringulasi teknik yaitu dengan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian ini melihat dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur serta pelaku UKM yang mengikuti program dana bergulir. Setelah melihat fenomena yang terjadi apakah program dana bergulir dapat berpengaruh terhadap daya saing UKM. Berdasarkan pada hasil penelitian ini implementasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur pada Program Dana bergulir sudah cukup baik. Namun kurangnya sosialisasi secara mendalam mengenai dana bergulir membuat perspektif pelaku UKM masih kurang, terutama pertanggung jawaban modal yang diberikan. Kurangnya pertanggung jawaban UKM terhadap dana bergulir tidak berpengaruh terhadap daya saing mereka.

**Kata Kunci :** *UKM, Pembiayaan, Dana Bergulir*

## 1. PENDAHULUAN

UKM memiliki kontribusi bagi perekonomian Indonesia, maka pemberdayaan UKM harus ditanggapi serius oleh Pemerintah Pusat maupun daerah, menurut Hadi (2014) *Krisis 1997-1998 yang melanda Indonesia merupakan era kebangkitan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sebelumnya tidak diperhatikan oleh pemerintah, tetapi setelah krisis moneter semua mengarahkan binaannya ke UKM karena sektor Usaha Kecil dan Menengah yang mampu bertahan terhadap krisis moneter tersebut.*

Dengan dibukanya MEA pada 2015, maka perlu dibutuhkan strategi dalam pemberdayaan UKM agar dapat bersaing. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus dalam pemberdayaan UKM antara lain pembiayaan dan penjaminan modal usaha, pengetahuan akan teknologi yang relevan, serta terbukanya akses informasi bagi pelaku usaha. Pemberdayaan UKM harus saling bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar saling berkesinambungan.

Masalah perizinan dan birokrasi menjadi salah satu pertimbangan bagi pengusaha baru dalam membuka usahanya. Masalah perizinan yang lama serta birokrasi yang tidak transparan menjadi faktor penghambat. Di beberapa negara maju perizinan dan birokrasi sangatlah mudah, sehingga para pengusaha baru tidak kesulitan dalam membuka usahanya.

Persaingan antara negara-negara di ASEAN menuntut Indonesia untuk berbenah. Kebijakan dalam sektor UKM menjadi faktor utama dalam mendukung dan memberdayakan UKM. Pemberdayaan UKM dapat berbentuk bantuan modal pembiayaan, pelatihan sumber daya manusia, informasi mengenai pasar, bantuan dalam memasarkan produk ke luar negeri serta sosialisasi akan teknologi yang menunjang. Pemberdayaan juga difokuskan agar semua pelaku usaha mendapat dampak dari kebijakan tersebut. Pemerataan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan pemberdayaan karena dengan adanya pemerataan maka semua pelaku usaha dari dari pelosok negeri pun mendapatkan dampak yang sama dengan pelaku usaha yang berada di kota. Setiap provinsi di Indonesia bertanggung jawab dalam mensosialisasikan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat agar kebijakan yang dibuat tersebut sampai pada pelaku usaha yang berada di daerah.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pemasukkan UKM terbesar adalah

provinsi Jawa Timur. I Made Sukharta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur dalam berita *Metronews.com* (2016) menyebutkan bahwa “Pada Januari hingga Agustus 2016 Sumbangan UKM pada PDRB Jatim sebesar Rp 900 Triliun. UKM merupakan penyumbang terbesar PDRB Jawa Timur saat ini sebesar 54,98 persen serta kehebatan UKM sudah teruji pada saat krisis melanda Jatim beberapa tahun lalu. Banyak industri skala besar kesulitan dalam menyelamatkan diri dari terpaan krisis. Sedangkan UKM yang jumlahnya ribuan di Jatim sangat kuat dan tangguh.” dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa UKM di Jawa Timur merupakan sektor yang paling berkontribusi apa bila dibandingkan dengan usaha-usaha besar yang ada di Jawa Timur.

Jawa Timur merupakan daerah yang sangat *concern* terhadap pemberdayaan UKM apalagi dengan adanya MEA semakin memacu untuk mendorong pelaku usaha *go international*. Dapat dikatakan provinsi Jawa Timur salah satu provinsi yang berhasil dalam melakukan pemberdayaan UKM dan dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain dalam mengembangkan UKM didaerah masing-masing. Untuk semakin meningkatkan daya saing pada MEA dibutuhkan beberapa kebijakan yang memacu pelaku UKM dalam bersaing dengan negara lain. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur memiliki beberapa kebijakan dalam mendukung UKM. Salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang terhadap perkembangan UKM adalah perluasan akses pembiayaan. Salah satu program andalan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam kebijakan perluasan pembiayaan yaitu Dana Bergulir. Dengan adanya program Dana Bergulir diharapkan mampu membuat UKM semakin berkembang.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Usaha Kecil Menengah (UKM)

#### Pengertian UKM

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) :

- 1) **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

2) **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

**Ciri-ciri UKM**

Ciri-ciri UKM dilihat dari asset, omset dan jumlah tenaga kerja menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 :

**Tabel 1. Ciri-ciri UKM**

Usaha	Asset	Omset	Jumlah Tenaga kerja
Usaha Kecil	>50 juta- 500 Juta	>300juta-2,5 miliar	<30
Usaha Menengah	>500juta-10 miliar	>2,5miliar-50miliar	Maks 300

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

**Pemberdayaan UKM**

Dalam pemberdayaan UKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) mengembangkan filosofi lima jari/ *Five finger philosophy*, artinya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

- 1) Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai *Agents of Development* (agen pembangunan).
- 2) Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam egulator sektor riil dan fiskal, menerbitkan izin-izin usaha, mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
- 3) Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UKM, termasuk *Promoting Enterprise Access to Credit* (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit.
- 4) Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UKM, khususnya usaha mikro, membantu UKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal *monitoring* kredit dan konsultasi pengembangan UKM.

5) Jari kelingking, mewakili UKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja. Kebersamaan Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) dan bank komersial merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk simbiosis mutualisme dalam ekonomi.

**Kendala yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah**

Perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam kendala. Tingkat intensitas dan sifat dari kendala-kendala tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama (Tambunan, 2002). Meski demikian kendala yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil menurut (Tambunan, 2002)

- 1) Kesulitan Pemasaran
- 2) Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia)
- 3) Masalah Bahan Baku
- 4) Keterbatasan Teknologi
- 5) Keterbatasan Finansial

**Perluasan Akses Pembiayaan sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UKM**

Akses pembiayaan pada UKM memiliki peran yang penting. Maka dari itu dibutuhkan akses perluasan pembiayaan agar para pelaku UKM di Jawa Timur memiliki kesempatan yang sama dalam menerima pembiayaan. Dengan adanya bantuan pembiayaan yang diberikan, UKM diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perokonomian di Jawa Timur. Dinas Koperasi dan UKM di Jawa timur melaksanakan beberapa program dalam menunjang perluasan akses pembiayaan antara lain : program Kredit Usaha Rakyat (KUR), *Loan Agreement* dan Dana Bergulir.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas koperasi dan UKM Jawa Timur sebagai pelaksana dalam memberikan sosialisasi mengenai KUR kepada masyarakat. Peneliti tidak memilih program ini sebagai objek penelitian dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Jatim tidak memiliki wewenang penuh dalam setiap prosesnya. Program *loan agreement* merupakan program yang dibuat Gubernur Sukarwo dengan tujuan memberikan akses pembiayaan pada bisnis yang bersentuhan langsung dengan hasil alam seperti perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan. Dengan adanya program ini ditujukan untuk

membantu para petani, peternak dan lainnya yang berskala kecil dan menengah untuk berkembang dan diberdayakan. Program ini tidak termasuk dalam fokus penelitian, objek penelitian ini hanya mencakup skala daerah dan nasional saja.

Penelitian ini berfokus pada program Dana Bergulir. Program ini merupakan unggulan dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur terlibat langsung mulai dari perencanaan, proses, hingga laporan pertanggung jawaban pembiayaan yang telah diberikan tersebut.

### **Program Dana Bergulir**

Program Dana Bergulir adalah bantuan pembiayaan dari Pemerintah daerah untuk UKM yang memiliki kendala dengan permodalan. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Pasal 1 tahun 2016 mengenai Dana bergulir yaitu dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi Masyarakat Jawa Timur yang berada di wilayah Jawa Timur maupun di luar wilayah Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur yang dimaksud adalah (a) Penduduk Jawa Timur yang berprofesi sebagai tenaga kerja sekaligus *entrepreneur* berada pada level start up; (b) Pelaku Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang sudah *feasible* (layak) namun belum *bankable*.

### **Non Performing Loan**

Menurut Dahlan Siamat (2004:92) “resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.” Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan*. *Non performing loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah di mana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{kredit kurang lancar} + \text{kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

## **2.2. Bisnis Internasional & Daya Saing UKM**

### **Bisnis Internasional**

Bisnis Internasional menurut Ball et al (2014:11) “Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melewati batas negara, kegiatan ini tidak hanya meliputi perdagangan internasional dan perusahaan manufaktur di luar negeri tetapi

juga industri jasa yang berkembang dibidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, periklanan, konstruksi, ritel dan komunikasi massa”.

### **Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)**

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 diawali dengan *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*. *AEC Blueprint* akan menjadi acuan untuk menciptakan integrasi ekonomi kawasan dalam MEA. Berdasarkan *AEC Blueprint* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *AEC Blueprint* mengandung empat pilar utama, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.

### **Daya Saing UKM dalam Menghadapi MEA**

UKM di Indonesia tidak hanya dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan pengangguran serta berkontribusi terhadap PDRB saja, namun tuntutan yang utama ialah persaingan. Persaingan dengan produk impor yang beredar di pasar domestik serta persaingan dalam MEA. Persaingan ini harus ditanggapi serius bagi pelaku usaha dikarenakan produk-produk impor memiliki kualitas yang bagus serta daya saing yang tinggi. Faktanya daya saing produk UKM di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan produk impor. Menurut Tambunan (2008), UKM yang berdaya saing tinggi di cirikan oleh: (1) kecenderungan yang meningkat dari laju pertumbuhan volume produksi, (2) pasang pasar domestik dan atau pasar ekspor yang selalu meningkat, (3) untuk pasar domestik, tidak hanya melayani pasar lokal saja tetapi juga nasional, dan (4) untuk pasar ekspor, tidak hanya melayani satu negara tetapi juga banyak negara. Dari kutipan tersebut dapat dikatakan bahwa UKM harus meningkatkan daya saing mereka di nasional hingga internasional agar semakin berkembang.

Salah satu cara meningkatkan daya saing yaitu melalui pemberdayaan bagi UKM. Ada berbagai bentuk pemberdayaan UKM, salah satunya yang menunjang yaitu perluasan akses pembiayaan. Dengan adanya perluasan akses pembiayaan, UKM dapat menerima kredit ringan, mendapat fasilitas *microfinance*, serta bantuan modal lainnya. Ini menjadi cara yang bagus untuk UKM dalam meningkatkan serta mempertahankan daya saing mereka.

### 2.3. SME Policy Index

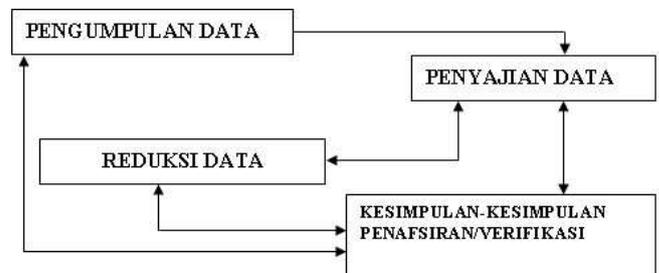
*SME Policy Index* sebagai alat untuk memantau, mengevaluasi, dan membandingkan kemajuan dalam kebijakan yang mendukung UKM yang ada di Asean. *SME Policy Index* dahulu dibuat oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) namun sekarang dikembangkan oleh *European Commission, the European Bank for Reconstruction and Development, and the European Training Foundation*. Penilaian ini sudah banyak berhasil di beberapa negara berkembang yang ingin mengukur seberapa efektif kebijakan yang mereka buat dalam mendukung UKM di negaranya.

*SME Policy Index* memiliki banyak fungsi dalam mengukur kebijakan UKM antara lain:

- Alat analisis yang dinamis untuk meninjau perkembangan kebijakan UKM pada sejumlah dimensi kebijakan dari berbagai negara
- Suatu proses dimana sekelompok negara berbagi tujuan kebijakan umum dan menyepakati untuk mengembangkan kerangka kerja bersama untuk memantau dan membandingkan kebijakan UKM;
- Dapat sebagai tempat untuk bertukar pengalaman dan berdiskusi dalam membuat kebijakan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Indonesia. Alamat lokasi penelitian yaitu Jalan Raya Bandara Juanda no 22, Sidoarjo, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari informan dan peristiwa sedangkan jenis data menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini instrumen penelitian berdasarkan peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Peneliti melakukan Analisa data dengan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (sugiyono, 2013:91) yang dikenal dengan sebutan *interactive model*. Komponen analisis Miles dan Huberman disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Komponen Analisis Data

Sumber: Sugiyono (2013)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Implementasi Kebijakan Perluasan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jawa Timur.

Program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berperan terhadap perkembangan usaha yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya program ini menandakan bahwa pemerintah sangat mendukung UKM untuk berkembang dan meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Program ini bertujuan agar UKM dapat menerima akses pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah provinsi Jawa Timur serta dapat mendorong para UKM agar dapat bersaing dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Pemerintah memiliki harapan besar terhadap implementasi program ini, sehingga peneliti perlu mengkaji apakah program ini sudah sesuai.

Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pembiayaan UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur diukur dengan menggunakan indikator *SME Policy Index* dan hasil wawancara dengan Staf Bidang Pembiayaan Seksi Fasilitas Permodalan dan Staf Bidang Pembiayaan Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan dan pelaku UKM. Hasil ini penelitian ini juga didukung dengan teori yang dijelaskan (Harvie, et al., 2010) yaitu kerangka hukum dan peraturan dan kemudahan akses permodalan.

#### 4.1.1. Bentuk - Bentuk Perluasan Pembiayaan a) Kerangka Hukum dan Peraturan

Dari hasil wawancara *SME Policy Index* mendalam dengan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur serta Pelaku UKM yang mengikuti program dana bergulir. Hasil yang didapatkan peneliti mengenai implementasi dalam kerangka hukum dan peraturan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sudah cukup diterapkan dengan baik.

Pada teori Harvie et al (2010) memberikan pengukuran bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sudah melaksanakan dengan cukup baik, namun pada penelitian tersebut solusi

dalam memberikan pembiayaan pada UKM yang tidak memiliki aset belum dilaksanakan. Dengan tidak adanya aset yang dimiliki UKM, Dinas Koperasi dan UKM Jatim serta lembaga keuangan belum berani memberikan pembiayaan, karena apabila UKM tersebut tidak memiliki aset maka dapat dikatakan tidak layak dan sangat beresiko apabila diberikan bantuan modal. Pertanggung jawaban UKM juga menjadi pertimbangan apabila sama sekali tidak memiliki aset Dinas Koperasi dan UKM serta lembaga keuangan tidak memiliki jaminan dalam mempertanggung jawabkan dana yang telah diberikan.

#### **b) Kemudahan Akses Permodalan**

Hasil yang didapatkan peneliti mengenai implementasi dalam kemudahan akses permodalan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diterapkan dengan cukup baik.

Teori Harvie et al, (2010) menilai bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menerapkan dengan cukup baik, tetapi pada pemberian fasilitas UKM dalam mengakses pinjaman mikro ke lembaga non keuangan (CSR perusahaan, hibah, dll) belum sepenuhnya diterapkan. Menurut keterangan dua informan peneliti Ibu Adisti Windiarti selaku Staf Bidang Pembiayaan Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan dan Bapak Dewantha Pramayudha selaku Staf Bidang Pembiayaan Seksi Fasilitasi Permodalan bahwa hibah sudah dilakukan namun bukan pada program dana bergulir ini. Ada program yang dikhususkan untuk mengatur hibah sendiri.

### **4.2. Perspektif pelaku UKM pada Kebijakan Perluasan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jawa Timur**

#### **4.2.1. Tingkat Kepatuhan Pelaku UKM**

Tingkat kepatuhan pelaku UKM merupakan salah satu cara untuk mengukur bagaimana pertanggung jawaban terhadap dana yang dipinjamkan serta apakah ada keterkaitan antara tingkat kepatuhan dengan perkembangan bisnis yang dijalankan oleh pelaku UKM. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan wawancara dan perhitungan NPL (*Non Performing Loan*) yang ditujukan kepada pelaku UKM.

Bapak Ahmad Fathoni Lisnanda selaku pemilik Kejaya Handicraft menjelaskan bahwa beliau melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tiga tahun, alasan beliau dikarena salah satu pendiri bisnis Kejaya Handicraft meninggal dunia jadi berpengaruh terhadap kredit Dana Bergulir. Sedangkan Bapak Muhammad Guntur pemilik Sadam ART menjelaskan bahwa

kredit yang beliau lakukan masih berlangsung hingga tahun 2019 dan beliau menyatakan adanya program ini membuat bisnisnya semakin berkembang pesat. Bantuan modal dengan bunga yang rendah sangat menyesuaikan kebutuhan dari pelaku UKM yang berat akan bunga Bank yang tinggi.

Melalui perhitungan yang dilakukan peneliti menghasilkan bahwa masih tingginya nilai NPL antara pelaku UKM yang sudah melakukan bisnis internasional dan yang belum melakukan bisnis internasional masih jauh diatas 5% . padahal nilai NPL diatas rata-rata yang ditentukan Bank Indonesia sebesar 5% maka dikategorikan tidak sehat. Jadi NPL pada program dana bergulir kelompok WUB yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur dapat dikategorikan tidak sehat.

#### **4.2.2. Kendala Pelaku UKM pada Program Dana Bergulir**

Kendala-kendala pelaku UKM merupakan salah satu cara mengetahui apakah program Dana Bergulir sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha atau tidak. Dengan adanya hasil dari wawancara ini dapat dijadikan sumber kajian terhadap program Dana Bergulir, serta masalah yang menjadi kendala bagi pelaku UKM dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

Bapak Ahmad Fathoni Lisnanda selaku pemilik Kejaya Handicraft yang mengikuti program sejak 2010, beliau mengeluhkan pengajuan proposal yang memakan waktu lama, serta dana yang turun diterima sekitar enam bulan dari pengajuan proposal.

Sedangkan Bapak Muhammad Guntur pemilik Sadam ART menjelaskan kendala yang dialami dalam mengikuti program Dana Bergulir pada 2016. Yaitu adanya premi sebesar 12 juta dirasa memberatkan, pada sosialisasi dengan pelaku UKM dan pada Peraturan Gubernur tidak tercantum mengenai tambahan biaya tersebut.

Dari dua hasil wawancara tersebut pelaku UKM memiliki kendala yang berbeda namun sejalan dengan teori yang dikemukakan. Menurut teori Pramiyanti (2008) mengenai masalah finansial biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu. Serta kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan membuat adanya kebingungan pelaku UKM.

#### **4.2.3. Fase Program Dana Bergulir**

Pada subbab ini peneliti membuat *timeline* agar memudahkan dalam melihat sejauh mana implementasi yang dilakukan dalam dana bergulir.

Serta melihat bagaimana kendala-kendala yang terjadi pada pelaku UKM dalam mengikuti program dana bergulir terpenuhi atau belum.



**Gambar 2. Fase Program Dana Bergulir.**

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, 2017

#### 4.2.4. Daya Saing UKM

Daya saing UKM merupakan cara untuk mengetahui apakah program dana bergulir memiliki dampak terhadap peningkatan bisnis pelaku UKM, yang dapat diartikan berpengaruh terhadap daya saing UKM.

Dari hasil wawancara yang mendalam mengenai pengaruh program dana bergulir kepada pelaku UKM menghasilkan bahwa pembiayaan yang diberikan berpengaruh terhadap volume produksi kedua UKM tersebut. Hasil wawancara ini sesuai dengan teori yang dijelaskan Tambunan (2008) mengenai UKM yang berdaya saing tinggi di cirikan oleh meningkatnya laju pertumbuhan pada volume produksi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Perluasan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jawa Timur.
  - a. Kerangka hukum dan peraturan, pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur

sudah cukup diterapkan dengan baik. Tetapi solusi dalam memberikan pembiayaan pada UKM yang tidak memiliki aset belum terjadi. Dengan tidak adanya aset yang dimiliki UKM, Dinas koperasi dan UKM Jawa Timur serta lembaga keuangan belum berani memberikaan pembiayaan, karena apabila UKM tersebut tidak memiliki aset maka dapat dikatakan tidak layak dan sangat beresiko apabila diberikan bantuan modal.

- b. Kemudahan Akses Permodalan, pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diterapkan dengan cukup baik. Pada pemberian fasilitas UKM dalam mengakses pinjaman mikro ke lembaga non keuangan seperti CSR perusahaan, belum diterapkan. Hibah sudah dilakukan namun bukan pada program dana bergulir. Ada program yang dikhususkan untuk mengatur hibah .
2. Tingkat kepatuhan pelaku UKM. Tingkat kepatuhan pelaku UKM masih rendah terlihat dari pengukuran NPL pada kategori tidak sehat.
  3. Kendala pelaku UKM yang terjadi antara lain alur pengajuan yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu. Serta kurang tersedianya informasi dan sosialisasi yang diberikan membuat adanya kebingungan pelaku UKM.
  4. Daya saing UKM, pengaruh perluasan akses pembiayaan terhadap daya saing meningkat dikarenakan adanya tambahan pada alat produksi dan sumber daya bahan baku yang dimiliki UKM.

### 5.2. Saran

1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan kemudahan dalam layanan pengajuan proposal dana bergulir, sebaiknya mulai menggunakan sistem online agar alur pengajuan proposal dana bergulir tidak memakan waktu lama hingga tahap penerimaan dana.
2. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan sosialisasi mengenai program dana bergulir agar penerimaan tersebar merata pada pelaku UKM yang benar-benar membutuhkan serta dapat meningkatkan tanggung jawab pelaku UKM dalam mengembalikan dana tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ball, Donald A, „J.Michael Geringer, Michael S. Minor, dan Jeanne M. Mcnett. 2014. *Bisnis Internasional*. Edisi 12 Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

- Bank Indonesia, 2016, Perkembangan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah, <http://www.bi.go.id> (diakses pada 20 Desember 2016)
- Bank Indonesia. 2015. *Peraturan Bank Indonesia no 17/11/PBI/2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia no 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional*. Jakarta : Bank Indonesia
- Dahlan Siamat. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Harvie, C., S. Oum, and D. Narjoko (eds.). 2010. *SMEs' Access to Finance in Selected East Asian Economies*. ERIA Research Project Report 2010-11. Jakarta: ERIA.
- Provinsi Jawa Timur. 2016. *Peraturan Gubernur Jawa Timur no 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir*. Jawa Timur : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2008. *SME Development In Indonesia: Do Economic Growth And Government Support Matter*. Trisakti : Universitas Indonesia.